

EKONOMI KUAT DAN BERDAULAT HANYA DENGAN SYARIAH

Rupiah terus tertekan. Kini nilainya terus merosot hingga menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS. Pelemahan ini bukan sekadar persoalan angka di pasar valuta asing. Ia berdampak nyata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa depresiasi rupiah berpotensi memicu inflasi impor, meningkatkan biaya produksi industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri, serta mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan konsumsi.

Akibatnya, daya beli masyarakat tergerus. Pasaunya, pendapatan riil mereka tidak bertambah secepat kenaikan harga barang dan jasa.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa sektor manufaktur mulai menghadapi kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor. Akibatnya, ruang untuk menahan kenaikan

harga semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menekan penjualan, mengurangi aktivitas usaha, dan mendorong efisiensi tenaga kerja yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Data Bank Dunia juga menunjukkan bahwa tantangan pasar kerja Indonesia masih cukup serius. Ini ditandai dengan banyaknya pekerjaan berupah rendah dan penurunan upah riil dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, ketika rupiah melemah tajam, kelompok masyarakat berpendapatan tetap dan kelas menengah menjadi pihak yang paling terdampak. Daya beli menurun. Biaya hidup meningkat. Kesempatan kerja pun makin terbatas.

Penyebab Rupiah Melemah

Pertama: Karena fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada impor dan aliran

modal asing. Memang Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, berbagai sektor strategis masih bergantung pada barang impor; mulai dari bahan baku industri, mesin produksi, teknologi, energi hingga sebagian kebutuhan pangan tertentu (seperti gandum dan kedelai). Data dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor bahan baku dan barang modal masih mendominasi struktur impor nasional.

Kedua: Karena ketergantungan pada investasi asing. Ini membuat nilai tukar rupiah rentan terhadap gejolak

Waktu Zhuhur

26 Dzulhijjah 1447 H/

12 Juni 2026 M

Untuk Jakarta & Sekitarnya

11.56 WIB

global. Dalam sistem ekonomi liberal kapitalistik, arus modal asing dapat masuk dengan cepat ketika prospek keuntungan tinggi, tetapi juga dapat keluar secara besar-besaran ketika terjadi ketidakpastian ekonomi atau kenaikan suku bunga di negara maju. Ketika investor asing menarik dananya dari pasar saham maupun obligasi Indonesia, permintaan terhadap dolar meningkat karena modal yang keluar dikonversi ke mata uang asalnya.

Ketiga: Karena utang negara terus meningkat. Sejumlah ekonom menyebut tahun 2026 sebagai periode yang berat karena jatuh tempo utang ribawi Pemerintah mencapai sekitar Rp. 833,96 triliun. Kondisi ini sering disebut sebagai *debt wall* atau “tembok utang”. Inilah situasi ketika kewajiban pembayaran menumpuk dalam satu periode tertentu sehingga membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

Keempat: Karena besarnya kebutuhan dana untuk membayar utang. Ini dapat memengaruhi persepsi investor terhadap risiko ekonomi Indonesia. Jika investor menilai risiko meningkat, mereka cenderung mengalihkan aset ke instrumen yang dianggap lebih aman. Dalam teori ekonomi internasional, kondisi ini dikenal sebagai meningkatnya *country risk premium*, yaitu tambahan risiko yang harus ditanggung oleh negara berkembang dibandingkan negara maju.

Kelima: Karena dominasi dolar Amerika Serikat dalam

sistem keuangan global. Ini menjadi penyebab struktural melemahnya rupiah. Dolar AS masih menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, transaksi komoditas, dan pembayaran utang luar negeri. Ketika Federal Reserve System menaikkan suku bunga acuannya, aset-aset berdenominasi dolar menjadi lebih menarik bagi investor global.

Keenam: Karena kombinasi antara faktor domestik dan global. Ketergantungan pada impor, tingginya kebutuhan pembiayaan utang, serta dominasi dolar dalam sistem ekonomi dunia menciptakan tekanan berlapis terhadap mata uang nasional.

Berdaulat dengan Syariah

Dari perspektif Islam, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan kurs atau moneter, tetapi merupakan gejala dari ketergantungan struktural yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme. Dengan kata lain, berbagai krisis ekonomi dan hilangnya keberkahan yang menimpa negeri ini pada hakikatnya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis-ekonomis. Ia lebih disebabkan oleh faktor ideologis, yakni penerapan sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang menjauhi petunjuk dan hukum Allah SWT. Al-Quran menjelaskan bahwa keberkahan hidup sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami). Karena itu Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu (TQS al-A'raf [7]: 96).

Dengan menerapkan sistem ekonomi kapitalisme sekuler dan meninggalkan syariah Allah, negeri ini telah melakukan kemaksiatan dan kekufuran sistemik, khususnya bidang ekonomi.

Di antara sumber persoalan ekonomi modern adalah dominasi sistem ribawi yang menjadi fondasi kapitalisme global pimpinan AS. Sayangnya, Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia telah menjerumuskan diri dalam ekonomi kapitalisme yang sarat dengan transaksi ribawi ini dan menjadikan AS sebagai rujukan. Padahal Islam secara tegas mengharamkan riba secara mutlak, baik pada level individu maupun negara. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (TQS al-Baqarah [2]: 275).

Allah SWT bahkan menyatakannya perang terhadap pelaku riba:

﴿فَأَذْنُوبًا يَحْرِبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

Karena itu umumnya perang dari Allah dan Rasul-Nya (TQS al-Baqarah [2]: 279).

Karena itu negeri ini wajib meninggalkan seluruh instrumen pembiayaan yang berbasis riba, termasuk utang berbunga dan obligasi ribawi. Sebagai gantinya, pembiayaan negara ditopang oleh sumber-sumber pendapatan *syar'i* yang telah ditetapkan Islam. Ini yang pertama.

Kedua: Negeri ini juga harus mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan tuntutan syariah. Syariah telah menetapkan bahwa negaralah yang berhak dan berkewajiban mengelola sumber daya alam yang menguasai hidup orang banyak. Syariah Islam telah mengharamkan privatisasi SDA atau menyerahkan kepemilikan SDA kepada pihak asing atau aseng. Rasulullah saw. menegaskan:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Karena itu tambang minyak, gas, batubara, emas, nikel, listrik, hutan dan sumber daya strategis lainnya harus dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Hasilnya menjadi sumber pemasukan besar bagi Baitul Mal sehingga negara tidak perlu bergantung pada modal asing maupun

utang dan pajak.

Ketiga: Negeri ini sudah seharusnya beralih pada mata uang dinar dan dirham agar terlepas dari dominasi mata uang kertas internasional yang terikat dengan dolar AS. Dengan sistem moneter berbasis emas dan perak, nilai mata uang lebih stabil, inflasi lebih terkendali dan ketergantungan terhadap mata uang asing dapat dikurangi secara signifikan. Secara historis, dinar emas dan dirham perak pernah menjadi alat tukar yang digunakan selama berabad-abad di negeri-negeri Islam di bawah sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang menerapkan Islam secara *kâffah*.

Keempat: Negeri ini harus mewujudkan kemandirian ekonomi dan industri dalam negeri. Islam telah mewajibkan negara membangun kekuatan ekonomi yang bertumpu pada kemampuan produksi riil di dalam negeri; bukan pada ketergantungan terhadap impor bahan baku, teknologi, mesin produksi maupun kebutuhan strategis lainnya. Negara wajib mengembangkan sektor pertanian, industri, energi, pertambangan, teknologi dan industri militer sehingga umat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Dengan begitu perekonomian tidak mudah terguncang oleh perubahan kondisi eksternal.

Kelima: Negeri ini harus membangun sistem keuangan negara yang mandiri melalui institusi Baitul Mal. Pemasukan negara tidak bertumpu pada utang ataupun pajak sebagai

sumber utama. Di antara sumber pemasukan Baitul Mal adalah *kharaj*, *jizyah*, *fai'*, *ghanimah*, 'usur, harta milik negara dan hasil pengelolaan kepemilikan umum. Dengan pengelolaan yang benar atas sumber daya alam dan berbagai sumber pemasukan *syar'i* lainnya, negara memiliki kemampuan membiayai kebutuhan publik tanpa harus menumpuk utang.

Namun demikian, semua solusi tersebut tidak mungkin bisa dilakukan kecuali jika negeri ini menerapkan syariah Islam secara *kâffah*. Peralpnya, Islam tidak memandang persoalan ekonomi sebagai masalah teknis semata, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus diatur berdasarkan wahyu. Allah SWT berfirman:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
Apakah sistem hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang meyakini? (TQS al-Ma'idah [5]: 50).

Karena itu solusi mendasar untuk mewujudkan mata uang yang kuat dan ekonomi yang berdaulat adalah penerapan syariah Islam secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Khilafahlah yang menerapkan hukum-hukum Allah dalam bidang politik, ekonomi, moneter, keuangan, perdagangan, industri dan pengelolaan sumber daya alam, dll. Dengan penerapan Islam secara *kâffah*, kemandirian

ekonomi, keadilan distribusi kekayaan dan stabilitas

moneter dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

GENOSIDA MASIH BERLANJUT DI GAZA, IRAN TIDAK MAU TUNDUK

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir agresi Israel menyebabkan 10 warga Palestina syahid dan 36 lainnya terluka. Sejumlah korban masih tertimbun di bawah reruntuhan dan belum dapat dijangkau tim penyelamat. Sejak gencatan senjata 11 Oktober, tercatat 956 syuhada, 3.020 korban luka, dan 782 orang hilang. Sementara itu, sejak dimulainya agresi pada 7 Oktober 2023, jumlah korban telah mencapai 72.971 syuhada dan 173.128 korban luka, mencerminkan terus berlangsungnya tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Al Jazeera dan BBC Arabic melaporkan bahwa ketegangan Iran-AS masih berlanjut ditandai dengan saling tuduh terkait serangan di Teluk Oman, Kuwait, dan Bahrain. Iran menegaskan tindakannya bersifat defensif serta memperingatkan akan merespons setiap tindakan yang dianggap bermusuhan. Meski situasi militer tetap memanas, jalur diplomasi belum tertutup. Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan adanya peluang kemajuan dalam perundingan dengan Iran, sementara DPR AS mengesahkan resolusi yang membatasi kewenangan presiden untuk menyerang Iran tanpa persetujuan Kongres, menunjukkan kekhawatiran terhadap kemungkinan meluasnya konflik di kawasan.

Dalam *Jawab Soal "Perang AS-Iran dan Realitas Iran"*, 17 Dzulhijjah 1447 H / 3 Juni 2026, disebutkan Analisis terbaru menunjukkan bahwa hubungan Iran dan Amerika Serikat saat ini masih berada dalam kondisi keterputusan politik dan strategis. Berbeda dengan masa lalu ketika Iran dinilai masih bergerak dalam orbit pengaruh Amerika, pemerintahan Iran saat ini disebut lebih banyak dikendalikan oleh Garda Revolusi yang mendorong arah kebijakan

yang lebih independen dan menolak kembali berada di bawah pengaruh Washington.

Posisi Garda Revolusi semakin kuat setelah terpilihnya Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, yang dalam berbagai urusan penting negara, termasuk keamanan, perang, dan stabilitas internal, sangat bergantung pada dukungan Garda Revolusi. Meskipun masih terdapat kelompok politik sipil seperti presiden, menteri luar negeri, dan ketua parlemen, pengaruh mereka dinilai tidak mampu menandingi dominasi Garda Revolusi dalam menentukan arah kebijakan strategis Iran.

Di sisi lain, Amerika Serikat dinilai belum berhasil memaksa Iran menjadi negara pengikut yang sepenuhnya tunduk pada kehendaknya. Meskipun berbagai tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik telah dilakukan, Teheran tetap menolak sejumlah tuntutan utama Washington. Presiden AS Donald Trump sendiri berulang kali menunjukkan keinginannya untuk memperoleh konsesi penuh dari Iran, bukan sekadar sebagian, sehingga proses negosiasi terus mengalami tarik-ulur dan perubahan sikap dari pihak Amerika.

Kembali perlu kita ingatkan kebangkitan kembali umat Islam dan berakhirnya dominasi negara-negara penjajah atas negeri-negeri Muslim tidak akan terwujud melalui negosiasi antarnegara semata, melainkan melalui kembalinya Khilafah Rasyidah sebagaimana dijanjikan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadis tentang kembalinya khilafah di atas manhaj kenabian. Institusi inilah yang kelak akan menjadi pelindung umat Islam, mengangkat kemuliaan mereka, serta mengakhiri dominasi kekuatan-kekuatan asing atas dunia Islam. Allahu Akbar. []

Hikmah

Imam Malik ra.:

«لَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا»

Tidak akan pernah bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat saat ini kecuali apa yang telah terbukti mampu memperbaiki kondisi generasi awal mereka.

(At-Tirmidzi, *Adhwâ' al-Bayân [Mukhtashar asy-Syamâil Muhammadiyah]*, 2/282).

Buletin Dakwah **KAFFAH**, terbit setiap Jum'at. **Penerbit:** Lembaga Kajian Islam Kaffah. **Alamat:** Wisma NH Lt-1, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 2 B-C Pancoran Jakarta Selatan 12780. **Marketing:** Mursyid Aziz 08787-444-1924 (WA/SMS only). **Infq** Rp. 300/eks. Pemesanan minimal 100 eks

Simpan baik-baik lembaran ini, di dalamnya ada ayat-ayat al-Quran